

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis *Whole of Government* dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Plus di Kabupaten Bangkalan yang menggunakan teori *Whole of Government* oleh Suwarno & Sejati (2017) dalam (Achmadi & Hariadi, 2020) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga dalam penyaluran bantuan sosial PKH Plus di Kabupaten Bangkalan telah terlaksana melalui kerja sama antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Bank Jatim, dan pendamping PKH Plus. Koordinasi dilakukan dalam berbagai tahapan pelaksanaan program, mulai dari penetapan penerima manfaat, pemutakhiran data, penyaluran bantuan hingga penyelesaian kendala di lapangan. Adanya komunikasi yang terjalin secara rutin menunjukkan bahwa masing-masing lembaga telah memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pelaksanaan program.

Fungsi koordinatif dijalankan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bidang tersebut berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program, mulai dari penetapan kebijakan, pengelolaan data penerima manfaat, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak memerlukan pembentukan lembaga koordinasi

baru karena mekanisme koordinasi telah dijalankan melalui struktur organisasi yang telah ada.

2. Koalisi Sosial dalam penyaluran bantuan sosial PKH Plus di Kabupaten Bangkalan telah terlaksana melalui kerja sama antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Bank Jatim, pendamping PKH, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Koalisi sosial tersebut tercermin dari adanya komitmen bersama antar aktor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program, menyelesaikan berbagai kendala yang muncul di lapangan, serta memastikan bantuan dapat disalurkan kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program melalui partisipasi dalam kegiatan yang menjadi kewajiban penerima manfaat. Dengan demikian, indikator koalisi sosial dalam pendekatan *Whole of Government* telah terlaksana melalui sinergi antar aktor pelaksana namun, masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyaluran bantuan sosial PKH Plus di Kabupaten Bangkalan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai Analisis *Whole of Government* dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Plus di Kabupaten Bangkalan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait

1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) sebagai unit yang menangani pelaksanaan PKH Plus perlu terus mengoptimalkan perannya

dalam mengoordinasikan seluruh aktor yang terlibat. Penguatan fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta menjaga sinergi antar lembaga yang telah terbangun.

2. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan gugus tugas lintas sektor yang melibatkan instansi terkait dalam pelaksanaan PKH Plus. Gugus tugas tersebut dapat berperan dalam memperkuat pengawasan, mempercepat tindak lanjut terhadap kendala yang ditemukan di lapangan, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program.
3. Pemerintah perlu meningkatkan koalisi sosial yang telah terbentuk melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendampingan serta penguatan koordinasi antar aktor pelaksana program. Upaya tersebut penting untuk menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam mendukung keberhasilan PKH Plus, sehingga tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dapat tercapai secara lebih tepat.
4. Perlu dilakukan pengembangan sistem pertukaran data dan informasi yang lebih terintegrasi antar lembaga pelaksana. Sistem yang terintegrasi akan memudahkan proses pemutakhiran data penerima manfaat, meningkatkan akurasi informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam pelaksanaan program.